



**KETAHANAN NASIONAL DENGAN DITUMPUKAN PADA PEMBANGUNAN DAN
PEMBAHARUAN PENDIDIKAN PASKA ADAPTASI KEBIASAAN BARU**

***National Resilience by Focusing on the Development and Renewal of Education
After the Adaptation of New Habits***

ENDRO TRI SUSDARWONO¹

¹Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Peradaban, saniscara99midas@gmail.com, 081229272296

ABSTRAK: Bangsa Indonesia membutuhkan suatu ketangguhan atas ketahanan nasional berupa kondisi dinamis bangsa Indonesia. Indonesia didukung dengan keunggulan jumlah kualitas manusia yang tinggi, bonus demografi yang akan dinikmati 2020-2030. Tujuan penelitian ini membahas mengenai bagaimana ketahanan nasional dengan ditumpukan pada pembangunan dan pembaharuan pendidikan paska adaptasi kebiasaan baru. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, metode yang digunakan adalah metode kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan tentang pendidikan sebagai pilar ketahanan nasional utama yang harus diberikan kebijakan yang tepat paska adaptasi kebiasaan baru, adapun metode kuantitatif yaitu uji statistik dengan pengujian hipotesis yang dilakukan guna memastikan ada atau tidaknya perubahan preferensi guru, orang tua dan siswa terhadap pembelajaran yang disarankan oleh pemerintah selama pendidikan masa pandemik covid 19. Metode ini dinamakan *Mac Nemar change test*. Berdasarkan hasil uji hipotesis terhadap perubahan preferensi terhadap pembelajaran terhadap reponden (terdiri dari guru, orang tua dan siswa), didapati terjadi perubahan yang signifikan bahwa baik guru, orang tua maupun siswa terhadap solusi pembelaran daring yang dianjurkan pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan sebagai pilar utama ketahanan nasional paska kebiasaan baru memerlukan perhatian utama. Pemerintah harus menjamin bahwa dalam pendidikan mampu membuat sekolah yang menyenangkan tanpa terganggu gonjang-ganjing iklim birokrasi dan politik pendidikan.

Kata kunci: covid 19, ketahanan nasional, pendidikan

ABSTRACT: *The Indonesian nation needs a resilience to National Resilience in the form of the dynamic conditions of the Indonesian nation. Indonesia is supported by the superiority of a high number of human qualities, a demographic bonus that will be enjoyed 2020-2030. The purpose of this study discusses how national resilience is based on the development and renewal of post-adaptation education to new habits. The approach in this research uses a descriptive approach, the method used is a combination of qualitative and quantitative methods. A qualitative approach is used to describe education as the main pillar of national resilience that must be given the right policies after the adaptation of new habits, as for the quantitative method, namely statistical tests with hypothesis testing carried out to ensure whether there is a change in the preferences of teachers, parents and students towards learning that is suggested by the government during education during the covid 19 pandemic. This method is called the Mac Nemar change test. This study concludes that education as the main pillar of post-new national resilience requires major attention. The government must ensure that in education it is able to create a pleasant school without being disturbed by the bureaucratic climate and educational politics. Based on the results of hypothesis testing on changes in preferences for learning towards respondents (consisting of teachers, parents and students), it was found that there was a significant change that both teachers, parents and students towards online learning solutions recommended by the government.*

Keywords: covid 19, national resilience, education

PENDAHULUAN

Ketahanan nasional hakikatnya adalah kondisi suatu bangsa yang menggambarkan kemampuan mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dan tantangan. Implementasi Ketahanan Nasional Indonesia dalam proses pembangunan nasional dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan keamanan digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam melindungi eksistensi serta nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat, bangsa, dan negara terhadap segala ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Pendekatan kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan Ketahanan Nasional itu dalam bentuk kemampuan bangsa dalam mengidentifikasi, membina, mengelola, serta mengembangkan potensi dan kekuatan nasional menjadi kemakmuran masyarakat, bangsa, dan negara secara adil merata serta proporsional [1].

Bangsa Indonesia membutuhkan suatu ketangguhan atas Ketahanan Nasional, yaitu kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi serta berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas,

kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya [2].

Pandemik Covid 19 yang melanda Indonesia menyebabkan terganggunya proses pembelajaran dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Di satu sisi diperlukan suatu upaya untuk mencegah penyebaran Covid 19 dengan memperkecil interaksi dengan orang banyak atau (*Social distancing*). Sementara di sisi lain pendidikan harus tetap berjalan, karena pendidikan adalah urusan mendasar bangsa yang lintas sektoral. Pendidikan bagi generasi bangsa harus tetap ada dan berjalan ditengah pandemik Covid 19. Berbagai pemikiran dan metode sudah diberikan dalam menangani pendidikan di masa pandemik ini, namun pro dan kontra juga muncul ke permukaan. Banyak yang menganggap bahwa solusi yang diberikan melalui pembelajaran jarak jauh atau daring terlalu memberatkan anak didik dan orang tua mereka, bahkan tidak sedikit pendidik yang mengeluhkan pembelajaran daring.

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung selama manusia hidup mulai dari dilahirkan hingga akhir hayat, dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan potensinya dengan maksimal untuk proses hidup yang mumpuni. Menurut Zakiah et.al (2019) pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk manusia yang unggul [3]. Pendidikan juga

merupakan usaha sadar untuk menyiapkan generasi yang siap dalam meneruskan berbagai perubahan yang baik dimasa yang akan datang. Menurut (Sholekah, et.al, 2017) pendidikan merupakan wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh diri individu [4]. Karena setiap perubahan zaman dan teknologi pendidikan itu sangat diperlukan untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan. Pendidikan merupakan salah satu usaha manusia untuk mengubah dan membina kepribadian yang melandaskan dengan nilai-nilai baik di dalam masyarakat maupun kebudayaan melalui proses pendidikan karena dengan pendidikan manusia akan memperoleh ilmu pengetahuan untuk bekal mereka hidup [5].

Nilai-nilai yang menjadi ciri kecintaan terhadap bangsa perlu disebarluaskan dan ditanamkan ke segenap lapisan masyarakat, salah satunya adalah ke peserta didik yang sedang menjalankan proses belajar di pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Sosialisasi nilai kecintaan terhadap bangsa yang dipayungi oleh konsensus nasional terhadap peserta didik merupakan upaya membangun karakter dan jati diri bangsa [6].

Revitalisasi peran dan tugas guru, kepala sekolah, dan pengawas satuan pendidikan kiranya amat dibutuhkan dalam membangun karakter bangsa ini terhadap peserta didik, serta perlu

diwujudkan ke dalam kompetensi dan kinerja dari ketiga pihak tersebut. Untuk itu upaya meregulasi peraturan mengenai kompetensi ketiga pihak yang memasukkan komponen pembangunan karakter bangsa sebagai salah satu peran dan tugas, menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan.

Secara legalistik, konsepsi pendidikan merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional merupakan upaya perubahan terencana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta dapat membuka pengetahuan, kesadaran dan pemahaman mengenai diri maupun lingkungan disekitarnya, sehingga bermanfaat dalam melakukan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik.

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memaparkan atau menggambarkan tentang ketahanan nasional dengan bertumpu pada pembangunan dan pembaharuan pendidikan paska kebiasaan baru. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan tentang pendidikan sebagai pilar ketahanan nasional paska adaptasi kebiasaan baru, adapun metode

kuantitatif yaitu Pengujian hipotesis yang dilakukan guna memastikan ada atau tidaknya perubahan preferensi guru, orang tua dan siswa, sebelum dan sesudah perlakuan (*before and after treatment research design*). Metode ini dinamakan *Mac Nemar change test* [7].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di bidang pendidikan, Indonesia berhasil mengubah *literacy rate* secara drastis jika kita melihat data di tahun 2010, yaitu 5% (1945) ke 92% (2010). Tidak banyak bangsa lain yang bisa mengubah dengan cepat dalam waktu beberapa dekade. Bandingkan dengan India, yaitu 12% (1947) ke 66% (2010) dan Mesir, yaitu 14,8% (1937) ke 66% (2010). Prestasi lain adalah peningkatan pesat dalam fasilitas pendidikan dan jumlah orang terdidik. Bayangkan saat awal kemerdekaan, hanya segelintir orang yang menikmati pendidikan dan saat ini kita punya lebih dari jutaan mahasiswa [8]. Pertanyaan yang ada haruskah keberhasilan ini dihentikan oleh wabah pandemik Covid 19 karena implementasi kebijakan pendidikan yang salah. Dunia pendidikan sebagai bagian terpenting dari ketahanan nasional memerlukan perhatian khusus dikarenakan yang dikelola adalah asset bangsa yang paling berharga, yaitu generasi negara. Paska adaptasi kebiasaan baru sudah selayaknya dunia pendidikan mencari formula yang tepat untuk mengatasi permasalahan dalam dunia pendidikan

di era pandemik Covid 19.

Semua Lembaga riset memprediksikan Indonesia akan makin maju dalam beberapa dekade ke depan. Dan, mereka berpikir optimistis bahwa republik ini akan makin tinggi berdirinya. Apalagi Indonesia didukung dengan keunggulan jumlah kualitas manusia yang tinggi, bonus demografi yang akan dinikmati 2020-2030, dan meningkatnya jumlah kelas menengah. Indonesia punya keuntungan dari kualitas manusia yang tinggi. Contohnya adalah Cina dan India yang mempunyai peran besar karena ditunjang jumlah penduduk yang besar. Meski secara rata-rata pendapatan perkapita masih rendah dibandingkan dengan negara Eropa, secara akumulatif, Cina dan India punya kekuatan besar.

Rasio usia produktif dan nonproduktif yang makin rendah juga menjadi bonus demografi. Indonesia akan menikmati bonus demografi pada rentang waktu 2020-2030. Pada rentang waktu ini, Indonesia punya keuntungan dengan peningkatan produktivitas. Fakta membuktikan bahwa negara-negara maju mulai kehilangan generasi muda karena peningkatan jumlah generasi tua. Akibatnya, negara-negara maju mengimpor pekerja asing untuk tetap menopang aktivitas. Mengapa ini menjadi faktor menarik? Bonus demografi adalah di mana sebuah negara mendapatkan keuntungan maksimal dengan rasio dependensi yang rendah antara usia produktif dan usia nonproduktif. Artinya, jumlah usia yang tidak produktif yang

ditanggung oleh usia produktif makin menurun.

Inilah salah satu alasan yang dapat kita simpulkan kenapa pendidikan yang nantinya *output*-nya berupa generasi muda menjadi pilar yang sangat penting dalam ketahanan nasional paska kebiasaan baru sehingga di waktu yang tepat negara Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dimana memiliki SDM yang sangat berkualitas dan produktif.

Berapa jumlah guru yang masih hidup?" Itu pertanyaan Kaisar Jepang sesudah bom atom dijatuhkan di tanah Jepang. Kisah itu beredar luas. Bisa jadi itu mitos, tetapi narasi itu mempunyai konteks yang valid: pemimpin "Negeri Sakura" itu memikirkan pendidikan sebagai soal amat mendasar untuk bangkit, menang, dan kuat. Dia sadar bukan alam yang membuat Jepang menjadi kuat, melainkan kualitas manusianya. Pendidikan jangan pernah dipandang sebagai urusan sektoral. Pendidikan adalah urusan mendasar bangsa yang lintas sektoral. Pendidikan merupakan ketahanan nasional yang utama.

Selama bangsa dan para pemimpinnya bicara pendidikan secara sambil lalu, dan selama masalah pendidikan dianggap bukan masalah kepemimpinan nasional, jangan harap masa depan akan bisa kuat, mandiri, dan berwibawa. Kunci kekuatan bangsa itu pada manusianya. Jangan hanya fokus pada infrastruktur penopang kehidupan bangsa. Sesungguhnya kualitas infrastruktur kehidupan sebuah bangsa semata-

mata cermin kualitas manusianya.

Bila dirunut ke belakang, sejak Indonesia merdeka lepas dari cengkeraman penjajahan kolonial bangsa-bangsa asing, penataan pendidikan mengalami dinamika amat kompleks seiring dengan perubahan kebijakan yang dianut rezim berkuasa. Hiruk pikuk penyelenggaraan pendidikan sudah barang tentu memiliki corak spesifik sebagaimana yang diinginkan rezim berkuasa. Pada era kekuasaan politik Orde Lama, pendidikan diarahkan untuk mewujudkan sosok manusia Indonesia yang susila, cakap, demokratis, dan dapat bertanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.

Pada era kekuasaan politik Orde Baru, pendidikan diarahkan untuk mewujudkan manusia Indonesia dengan kemampuan utuh, yaitu manusia Indonesia yang berpancasila, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, mampu mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi, berbudi pekerti luhur, serta selalu mencintai bangsanya dan sesama manusia.

Hal ini sebagaimana tertuang antara lain dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) nomor IV /MPR/ 1973. Selain itu, terdapat aturan yuridis kebijakan pendidikan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan

membawa amanat perbaikan pendidikan yang diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Para era reformasi pendidikan diupayakan agar dapat dibangun di atas fondasi aspirasi politik masyarakat yaitu terselenggaranya proses demokratisasi dan hak asasi manusia. Era ini dianggap sebagai era yang paling drastis dalam menata kehidupan pendidikan, lebih-lebih setelah adanya terobosan baru bidang manajemen berupa desentralisasi pendidikan. Desentralisasi merupakan amanat dari kecenderungan global yang muncul dan berkembang sebagai bagian dari agenda global tentang demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai salah satu isu strategis dari desentralisasi pendidikan adalah diusahakannya agar pelayanan pendidikan dapat diberikan lebih optimal kepada masyarakat [9].

Pada era Covid 19, pendidikan dihadapkan jalan terjal bagaimana untuk mencegah penyebaran pandemik Covid 19. Pendidikan terkesan dipaksakan untuk tetap berjalan meskipun kebijakan yang diberikan dalam

pendidikan tidak mampu dilaksanakan terutama untuk sekolah yang terpencil. Hilangnya ciri khas yang terdapat dalam lingkungan sekolah menjadi hal khusus yang menyertai pandemik Covid 19 ini. Pro kontra terhadap solusi yang diberikan oleh Pemerintah dalam dunia pendidikan menjadi suatu wacana yang harus digali secara terus menerus. Dunia pendidikan harus mempunyai resep khusus agar penularan wabah Covid 19 bisa dihambat dalam kondisi pembelajaran yang ada disekolah sekaligus tetap berjalan pendidikan dengan semaksimal mungkin dengan tanpa harus mengurangi arti pendidikan itu sendiri. Ini merupakan dua pil pahit yang harus ditelan sekaligus, di sisi lain pendidikan menjadi tujuan kita bernegara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan pendidikan seharusnya menjadi pilar utama dalam Ketahanan Nasional. Tidak ada suatu negara manapun yang tidak menggantungkan ketahanan nasionalnya pada generasi mereka yang dapat diandalkan.

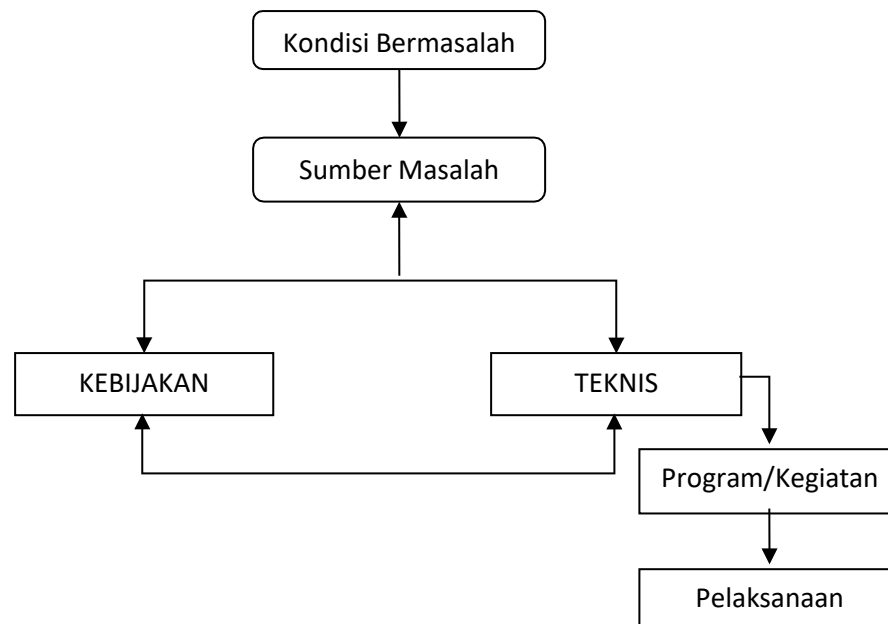
Berbicara pendidikan, Indonesia dihadapkan dengan kenyataan bahwa hampir 80 persen siswa Indonesia yang diukur dengan *test of international math and science* memiliki skor sangat rendah dan di bawah minimal [8]. Sistem yang ada melahirkan hasil yang ada, jika diinginkan hasil yang lain maka sistem harus diubah [10].

Kebijakan pendidikan (*education policy*) adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang

dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu [11]. Proses formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan tidaklah bersifat “*sui generi*” dan steril dari aneka pengaruh eksternal. Proses formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan tersebut berada dalam ranah dinamik yang rentan terhadap aneka pengaruh kepentingan politik dan birokratik. Mulai dari pemunculan isu, kemudian berkembang menjadi debat publik melalui media masa serta forum-forum terbatas, lalu ditangkap aspirasinya oleh partai politik untuk diartikulasikan dan dibahas dalam Lembaga legislatif, sehingga menjadi kebijakan publik pendidikan.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan pendidikan terlahir melalui proses-proses politik tersebut muncul konflik-konflik politik antar beragam kepentingan yang tidak bisa dipertemukan. Biasanya konflik-konflik tersebut akan reda dengan sendirinya manakala berbagai kepentingan yang ada telah terjadi titik

temu. Dampak dari kompleksitas dinamik suatu kebijakan pendidikan diatas selanjutnya memunculkan aneka persoalan yang cukup kompleks pula. Kompleksitas persoalan pendidikan misalnya menyangkut seberapa jauh semua golongan masyarakat memiliki akses yang sama untuk memperoleh pendidikan? Apakah pendidikan telah dapat melayani secara merata terhadap semua warga bangsa Indonesia? Mengapa mutu pendidikan belum dapat beranjak naik secara signifikan? Seberapa tinggi tingkat relevansi program pendidikan yang diselenggarakan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha? Bagaimana upaya efisiensi manajemen penyelenggaraan sistem pendidikan. Setidaknya ini yang harus dipikirkan kita bersama setelah paska adaptasi kebiasaan baru dunia pendidikan jika dikaitkan dengan ketahanan nasional. Berkaitan dengan gambaran kebijakan bidang pendidikan dalam konteks masalah dapat dilihat seperti pada Gambar 1.

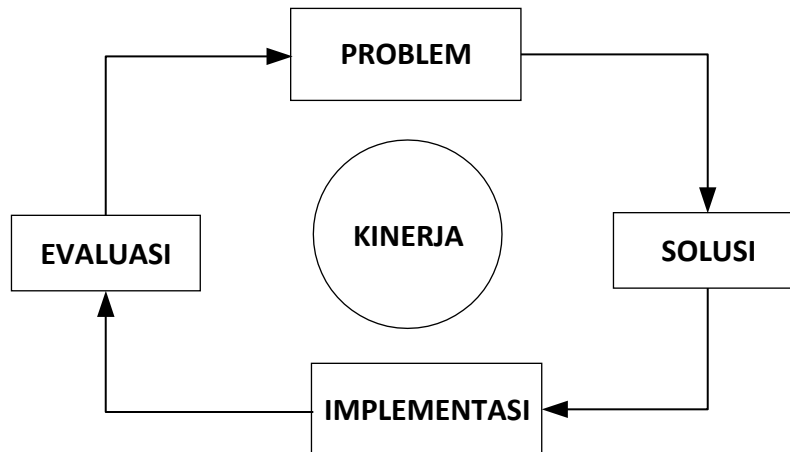


Gambar 1. Kebijakan Pendidikan dalam Konteks Masalah

Di samping persoalan-persoalan internal pendidikan, hal lain yang muncul sebagai persoalan adalah menyangkut kebijakan apakah yang sedang atau sudah pernah dibuat untuk mengatasi masalah dan apa sajakah hasilnya? Apakah yang menjadi tujuan kebijakan pendidikan? Bagi siapakah kebijakan pendidikan diformulasikan dan diimplementasikan? Bagaimana cara perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan dilakukan? Siapa sajakah yang terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan? Seberapa efektifkah kebijakan pendidikan dijalankan dalam rangka untuk memecahkan permasalahan pendidikan? Seberapa bermakna hasil yang

diperoleh dari implementasi kebijakan bagi masyarakat? Terhadap semua permasalahan tersebut pada gilirannya telah menyebabkan semakin rumitnya kebijakan pendidikan ditengah rumitnya permasalahan pendidikan di era Covid 19.

Tentu saja terhadap aneka persoalan pendidikan yang kompleks dan rumit pada era sekarang, kebijakan pendidikan hadir dan berusaha memberikan solusi implementasi yang efektif. Kebijakan pendidikan mendekatinya melalui proses siklus antara problem, solusi, implementasi, dan evaluasi untuk menghasilkan kinerja kebijakan, seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Siklus Pemecahan Masalah Pendidikan Melalui Kebijakan

Secara teoretik, kebijakan paska adaptasi kebiasaan baru dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan lebih bermutu mencakup empat pendekatan implementatif dalam mana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Keempat pendekatan implementatif tersebut adalah: (1) *structural approach*, (2) *procedural and managerial approach*, (3) *behavioural approach*, serta (4) *political approach*.

Ada tiga langkah-langkah yang tepat di dalam proses implementasi kebijakan dalam pendekatan prosedural dan manajerial. Yaitu setelah dilakukannya identifikasi masalah serta pemilihan kebijakan yang dilihat dari sudut biaya dan efektivitas paling memenuhi syarat. Ketiga langkah tersebut meliputi:

1. Membuat desain program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya, dan waktu.

2. Melaksanakan program kebijakan dengan cara mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat.
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

Pendidikan adalah soal interaksi antarmanusia. Interaksi antara pendidik dan peserta didik, antara orang tua dan anak, antara guru dan murid, serta antara lingkungan dan para pembelajar. Guru adalah inti dari proses pendidikan. Guru menjadi kunci utama kualitas pendidikan. Berhenti memandang soal guru sebagai sekedar soal kementerian atau sebatas urusan kepegawaian. Soal guru adalah soal masa depan bangsa. Di ruang kelasnya ada wajah masa



depan Indonesia. Gurulah kelompok yang paling awal tahu potret masa depan dan gurulah yang bisa membentuk potret masa depan bangsa Indonesia. Cara sebuah bangsa memperlakukan gurunya adalah cermin cara bangsa memperlakukan masa depannya.

Guru merupakan salah satu pelaku dalam pendidikan melalui jalur sekolah. Pendidikan adalah proses penanaman nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan adalah proses pengembangan potensi seseorang untuk mencapai kematangan diri (kedewasaan). Pendidikan adalah proses *enobling* (pemartabatan, pemuliaan) manusia. Masih banyak pengertian, definisi, atau pemahaman orang tentang pendidikan. Namun ketika konsep ini diterjemahkan ke dalam realitas seperti kebijakan, implementasi kebijakan, pelembagaan pendidikan termasuk proses pembelajaran akan bersentuhan dengan dimensi-dimensi kehidupan lainnya, seperti politik, dan ekonomi. Dalam persentuhan tersebut, Tarik menarik kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penentuan kebijakan tidak dapat dihindarkan dan akan memberi dampak terhadap guru dalam menjalankan profesinya (pembelajaran). Ada beberapa pertanyaan seperti “Apakah semua pihak seperti guru, masyarakat, penguasa) komit terhadap pendidikan bermutu paska adaptasi kebiasaan baru di masa pandemik Covid 19? Apa yang mereka pahami tentang mutu sendiri? Apa yang harus dilakukan agar mutu

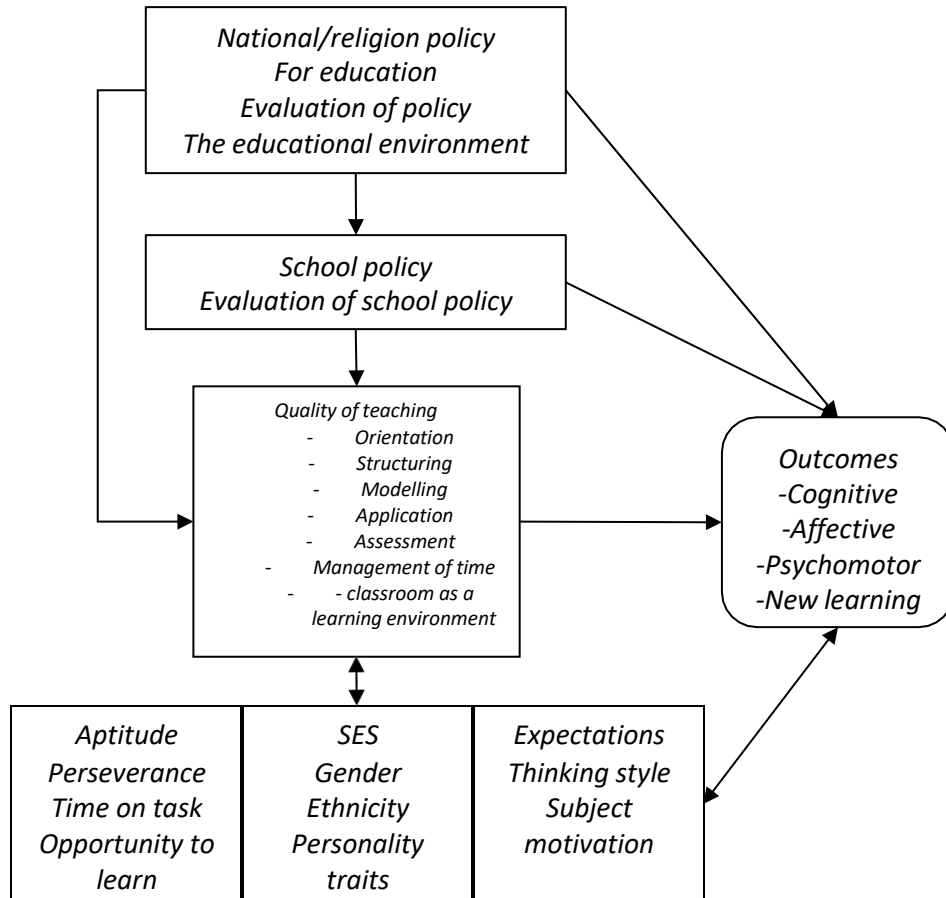
pendidikan kita meningkat atau maju karena ini menentukan ketahanan nasional kita? Apabila guru sebagai garda yang paling depan, usaha-usaha (pendekatan dan program) yang dilakukan untuk menjamin mutu atau kompetensi guru terjaga atau berkembang? Program dan kebijakan yang pro-mutu sangat penting terlebih untuk merespons tuntutan kehidupan ke depan meskipun kita dihantui dengan penyebaran wabah covid 19 sekarang ini.

Paling tidak, ada tiga persoalan besar mengenai guru kita. Pertama, distribusi penempatan guru tidak merata. Di satu tempat kelebihan, ditempat lain serba kekurangan. Kekurangan guru juga terjadi di kota dan di desa yang dekat kota. Ini harus dibereskan. Kedua, kualitas guru yang juga tidak merata. Kita harus mencurahkan perhatian total untuk meningkatkan kualitas guru. Mudahkan dan berikan akses bagi guru untuk mengembangkan potensi diri dan kemampuan mengajar. Bukan sekadar mendapatkan gelar pascasarjana, melainkan soal guru makin matang dan terbuka luas cakrawalanya. Ketiga, kesejahteraan guru tak memadai. Dengan sertifikasi guru telah terjadi perbaikan kesejahteraan, tetapi ada konsekuensi administratif yang sering justru merepotkan guru dan perlu dikaji ulang. Selain soal guru honorer, guru bantu yang masih sering diperlakukan secara tak *honoured* (terhormat) [8].

Menurut model proses, mutu dilihat dari

proses, yaitu proses (belajar) yang berjalan dengan baik di sekolah yang baik. Proses yang baik dapat memberi andil terhadap efektivitas secara

keseluruhan program. Guna memahami lebih mendalam terkait pendidikan yang bermutu, dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. *The Dynamic Model of Educational Effectiveness*

Guru memiliki tugas dan fungsi sebagai perancang pembelajaran, pelaksana kurikulum, motivator, evaluator, dan pembimbing. Bahkan guru berperan menjadi *role model* bagi peserta didik dalam mewujudkan karakter peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab [12]. Peran guru dalam mewujudkan proses pendidikan yang berkualitas merupakan harga mati yang harus dibayar dengan peningkatan sumber daya guru yang terus menerus. Dalam perkembangannya peran guru bergeser seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya dari

paradigma pendidikan *teacher centered* menjadi *student centered* bahkan proses pembelajaran sudah seharusnya dilaksanakan dengan menciptakan proses belajar yang berprinsip pada *learning to know, learning to do, learning to live to*

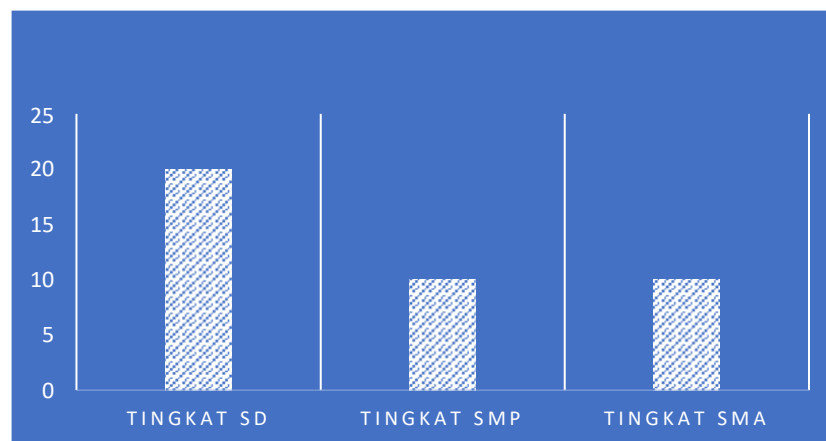
gather, dan learning to be.

Berikut disajikan deskripsi data responden yang digunakan dalam penelitian ini. Responden untuk guru dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Deskripsi Responden untuk Guru

Guru	Responden
SD	20
SMP	10
SMA	10
Jumlah	50

Sedangkan untuk responden orang tua dan siswa disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Komposisi Responden untuk Orang Tua/Siswa Menurut Tingkatan Pendidikan

Dari data diatas kemudian dilakukan pengujian hipotesis atas perubahan *Mac Nemar change tes* guna memastikan ada atau tidaknya perubahan preferensi guru, orang tua dan siswa diawal dan pada masa berjalannya pandemik Covid 19 terhadap mendukung atau menolak terhadap

pendidikan (pembelajaran) yang dilakukan secara daring selama masa pandemik covid 19 (pemerintah diawal pandemik Covid 19 menganggap kebijakan dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh/daring adalah solusi yang tepat, setelah pembelajaran ini diterapkan dan

berjalan beberapa bulan di masa Pandemi Covid 19, banyak responden dalam penelitian ini yang beranggapan bahwa solusi pembelajaran daring ini tidak tepat, dan cenderung menghilangkan ciri dari pendidikan itu sendiri). Dari data yang diperoleh dari reponden kemudian dilakukan pengujian dengan beberapa langkah pengujian hipotesis yang harus dilakukan di antaranya adalah:

Merumuskan hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. Hipotesis nihil pada intinya menyatakan bahwa tidak terjadi perubahan preferensi pembelajaran di masa pandemi covid 19. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa terjadi perubahan preferensi pembelajaran di masa pandemi Covid 19. Karena itulah, dalam kasus ini hipotesis nihil dan hipotesis alternatif dirumuskan secara simbolis sebagai berikut:

$$H_0 : P_{\text{preferensi}} = P_{\text{preferensi tidak terjadi perubahan}}$$
$$H_a : P_{\text{preferensi}} \neq P_{\text{preferensi tidak terjadi perubahan}}$$

Berkaitan dengan kasus ini, taraf signifikansi yang diberlakukan adalah 5% atau 0,05. Dalam

tabel *khai-kuadrat*, nilai *khai-kuadrat* untuk derajat kebebasan sebesar 1 dan taraf signifikansi 0,05 adalah 3,841. Nilai *khai-kuadrat* dalam tabel sebesar 3,841 itu menjadi landasan untuk merumuskan kriteria pengujian serta kesimpulan akhir. Karenanya, kriteria pengujian hipotesis yang diberlakukan adalah bahwa hipotesis nihil diterima apabila

$$x^2 \leq 3,841$$

Sedangkan hipotesis nihil ditolak jika

$$x^2 > 3,841$$

Apabila prosedur pengujian hipotesis yang dilakukan dalam kasus ini telah sampai pada tahapan menghitung nilai *khai-kuadrat*, sebelumnya beberapa langkah perhitungan harus ditempuh. Hasilnya ditampilkan secara ringkas melalui tabel 2 x 2 di bawah. Berikut disajikan 3 (tiga) tabel responden untuk guru, orang tua siswa, dan siswa.

Tabel 2.
Perubahan Keadaan preferensi Guru Terhadap Pembelajaran Selama Pandemi Covid 19

Keadaan preferensi di awal Pandemi Covid 19	Keadaan preferensi di akhir tahun 2020	
	Mendukung	Tidak mendukung
Tidak Mendukung	10	4
Mendukung	6	30

Berdasarkan tampilan data dalam Tabel 2 tersebut nilai *khai-kuadrat* dihitung melalui

penerapan rumus berikut. Pada kasus ini, besarnya nilai *khai-kuadrat* adalah:

$$x^2 = \frac{[A - (\frac{A+D}{2})]^2}{\frac{A+D}{2}} + \frac{[D - (\frac{A+D}{2})]^2}{\frac{A+D}{2}}$$

$$x^2 = \frac{[10 - (\frac{10+30}{2})]^2}{\frac{10+30}{2}} + \frac{[30 - (\frac{10+30}{2})]^2}{\frac{10+30}{2}} = \frac{100}{20} + \frac{100}{20} = 10$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada tahapan sebelumnya, nilai *khai-kuadrat* adalah 10. Nilai tersebut lebih besar daripada nilai *khai-kuadrat* dalam tabel 3,841. Sehingga, hipotesis nihil yang menyatakan bahwa tidak terjadi perubahan

preferensi Guru dalam pembelajaran di masa pandemik Covid 19 ditolak. Sebaliknya, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa terjadi perubahan preferensi Guru dalam pembelajaran di masa pandemik Covid 19 diterima.

Tabel 3.
Perubahan Keadaan preferensi Orang tua Terhadap Pembelajaran Selama Pandemi Covid 19

Keadaan preferensi di awal Pandemi Covid 19	Keadaan preferensi di akhir tahun 2020	
	Mendukung	Tidak mendukung
Tidak Mendukung	5	14
Mendukung	11	20

Berdasarkan tampilan data dalam Tabel 3 tersebut nilai *khai-kuadrat* dihitung melalui penerapan

rumus berikut. Pada kasus ini, besarnya nilai *khai-kuadrat* adalah:

$$x^2 = \frac{[A - (\frac{A+D}{2})]^2}{\frac{A+D}{2}} + \frac{[D - (\frac{A+D}{2})]^2}{\frac{A+D}{2}}$$

$$x^2 = \frac{[5 - (\frac{5+20}{2})]^2}{\frac{5+20}{2}} + \frac{[20 - (\frac{5+20}{2})]^2}{\frac{5+20}{2}} = \frac{56,25}{12,5} + \frac{56,25}{12,5} = 9,000$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas didapatkan untuk nilai *khai-kuadrat* adalah 9,000. Nilai tersebut lebih besar daripada nilai *khai-*

kuadrat dalam tabel 3,841. Sehingga, hipotesis nihil yang menyatakan bahwa tidak terjadi perubahan preferensi orang tua dalam pembelajaran di masa

pandemik Covid 19 ditolak. Sebaliknya, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa terjadi perubahan preferensi orang tua dalam pembelajaran diterima.

Tabel 4.
Perubahan Keadaan preferensi Siswa Terhadap Pembelajaran Selama Pandemi Covid 19

Keadaan preferensi di awal Pandemi Covid 19	Keadaan preferensi di akhir tahun 2020	
	Mendukung	Tidak mendukung
Tidak Mendukung	6	12
Mendukung	9	23

Berdasarkan tampilan data Tabel 4 tersebut nilai khai-kuadrat dihitung melalui penerapan rumus berikut. Pada kasus ini, besarnya nilai khai-kuadrat adalah:

$$x^2 = \frac{[A - (\frac{A+D}{2})]^2}{\frac{A+D}{2}} + \frac{[D - (\frac{A+D}{2})]^2}{\frac{A+D}{2}}$$

$$x^2 = \frac{[6 - (\frac{6+23}{2})]^2}{\frac{6+23}{2}} + \frac{[23 - (\frac{6+23}{2})]^2}{\frac{6+23}{2}} = \frac{72,25}{14,5} + \frac{72,25}{14,5} = 9,965$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas didapatkan untuk nilai khai-kuadrat adalah 9,965. Nilai tersebut lebih besar daripada nilai *khai-kuadrat* dalam tabel 3,841. Sehingga, hipotesis nihil yang menyatakan bahwa tidak terjadi perubahan preferensi siswa dalam pembelajaran di masa pandemik Covid 19 ditolak. Sebaliknya, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa terjadi perubahan preferensi siswa dalam pembelajaran di masa pandemik Covid 19 diterima.

Perubahan terhadap preferensi orang tua terhadap pembelajaran daring setelah dilaksanakan selama masa pandemik Covid 19 disebabkan karena beberapa alasan dan

pertimbangan. Berikut alasan dan pertimbangan yang diberikan oleh responden orang tua.

1. Selama waktu proses pembelajaran daring, siswa tidak belajar malah menggunakan waktunya untuk bermain.
2. Orang tua mengalami kesulitan dalam menerjemahkan dan mengajarkan pelajaran yang diberikan guru kepada siswa.
3. Ketika mendampingi belajar siswa, dalam mencari jawaban siswa ataupun orang tua lebih mengandalkan jawaban dari Google yang tidak tahu nilai kebenarannya.

4. Daring tidak membuat siswa mengalami situasi belajar yang sesungguhnya (yang dimaksud disini adanya interaksi secara langsung).
5. Memang dari awal tidak setuju dengan adanya pembelajaran daring.

SIMPULAN

Dunia sekolah merupakan replika masyarakat masa depan. Semua peristiwa dan suasana (iklim) yang terjadi selama anak bersekolah – selama anak mengikuti kegiatan belajar di kelas, kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan lainnya – akan mewarnai kepribadian anak kelak setelah dewasa. Bentuk interaksi yang terjadi antara anak dengan anak, anak dengan guru, anak dengan orang tua, orang tua dengan guru, dan antar guru dengan guru dan semua warga sekolah berkontribusi terhadap pembentukan karakter anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan sebagai pilar utama ketahanan nasional paska kebiasaan baru memerlukan perhatian utama. Pendidikan adalah menciptakan manusia yang bisa melakukan hal baru, tidak sekadar mengulang apa yang telah dilakukan generasi sebelumnya, manusia yang kreatif memiliki daya cipta, memiliki Hasrat keingintahuan. Pemerintah harus menjamin bahwa dalam pendidikan mampu membuat sekolah yang menyenangkan siswa akan tetap mampu berjalan baik tanpa terganggu oleh gonjang-ganjing iklim birokrasi dan politik pendidikan. Dan berdasarkan hasil uji hipotesis

terhadap perubahan preferensi terhadap pembelajaran di masa pandemik Covid 19 terhadap reponden (terdiri dari guru, orang tua dan siswa), didapati terjadi perubahan yang signifikan bahwa baik guru, orang tua maupun siswa terhadap solusi pembelajaran daring yang dianjurkan oleh pemerintah. Di awal wabah pandemik Covid 19 Pemerintah menerapkan kebijakan untuk pembelajaran jarak jauh (daring), pemerintah menganggap ini adalah kebijakan yang terbaik, namun setelah berjalan beberapa bulan, banyak kendala yang bermunculan dan menyebabkan preferensi dari responden yang tadinya banyak mendukung terhadap pembelajaran daring berubah menolak terhadap pembelajaran daring.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus, A. Aco. (2015). Urgensi Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Indonesia. *Jurnal Integrasi PIPS Pascasarjana UNM*, 1(2), 247-257.
- [2] Soepandji, Wijoyo K, Farid M. (2018). Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 436-456.
- [3] Zakiah, N. E., Surayo, Y., Amam, A. (2019). Implementasi pendekatan kontekstual pada model pembelajaran berbasis masalah berdasarkan langkahlangkah polya. *Teorema: Teori dan Riset Matematika*, 4(2), 111-120.



- [4] Sholekah L. M., Anggreini D., Waluyo A. (2017). Analisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal matematika ditinjau dari koneksi matematis materi limit fungsi. *Wacana Akademika*, 1(2), 151 – 164.
- [5] Suraji, Maimunah, Saragih S. (2017). Karakteristik instrument penilaian hasil belajar matematika ranah kognitif yang dikembangkan mengacu pada model pisa. *Suska Journal of Mathematics Education*, 3(2), 130.
- [6] Mahdiandyah (Ed.). (2011). *Pendidikan Membangun Karakter Bangsa*. Jakarta: Penerbit Bestari Buana Murni.
- [7] Lestari, Karunia Eka & Yudhanegara, Mokhammad Ridwan. (2015). *Penelitian Pendidikan Matematika*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [8] Baswedan A. 2015. *Merawat Tenun Kebangsaan*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- [9] Rohman A, Wiyono T. 2011. *Education Policy in Decentralization Era*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [10] Anas, Zulkifli. (2013). *Pendidikan Untuk Kehidupan: Gagasan Awal Untuk Berpikir Ulang Tentang Sistem Pendidikan Kita dan Memahami Posisi Kurikulum*. Jakarta: AMP Press.
- [11] Tilaar H, Nugroho R. 2008. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [12] Musfah, Jejen (Ed.). 2015. *Redesain Pendidikan Guru: Teori, Kebijakan, dan Praktik*. Jakarta: Kencana.